

Hasil Laporan Evaluasi

Instansi : Badan Narkotika Nasional
Nama Inspektur : IRTAMA BNN
Waktu Pengisian : 2015-04-21 14:10
Waktu Pengevaluasian :
Tahap : Tahap 3 *)

Penilaian	Penjelasan	Jawaban	Nilai	Presentase (Bobot / Nilai)	Nama/ Nomor Dokumen Pendukung
A. PROSES (60).			44.89	74.82%	
I. Manajemen Perubahan			3.23	64.63%	
1. Tim Reformasi Birokrasi			0.67	66.67%	

	a	Tim Reformasi Birokrasi telah dibentuk	<p>a. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi sesuai kebutuhan organisasi</p> <p>b. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi namun belum sesuai kebutuhan organisasi</p> <p>c. Belum membentuk Tim Reformasi Birokrasi</p>	A	1		<p>Keputusan dan Surat Perintah terkait dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan BNN. 1. Keputusan Kepala BNN No : Kep/146/IV/2013/BNN tanggal 26 April 2013 tentang Revisi Keanggotaan Tim Pengarah Reformasi Birokrasi; 2. Keputusan Kepala BNN No : Kep/147/IV/2013/BNN tanggal 26 April 2013 tentang Revisi Keanggotaan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi; 3. Keputusan Kepala BNN No : Kep/148/IV/2013/BNN tanggal 26 April 2013 tentang Revisi Keanggotaan Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan BNN; 4. Surat Perintah No : Sprin/1022/V/2013/BNN tanggal 29 Mei 2013 tentang Tim Pokja Penataan dan Penguatan Organisasi di lingkungan BNN; 5. Surat Perintah No : Sprin/1023/V/2013/BNN tanggal 29 Mei 2013 tentang Tim Pokja Penataan Tata Laksana di lingkungan BNN; 6. Surat Perintah No : Sprin/1024/V/2014/BNN tanggal 29 Mei 2013 tentang Tim Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur di lingkungan BNN; 7. Surat Perintah No : Sprin/1025/V/2014/BNN tanggal 29 Mei 2013 tentang Tim Pokja Penataan Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan BNN; 8. Surat Perintah No : Sprin/1026/V/2014/BNN tanggal 29 Mei 2013 tentang Tim Pokja Penguatan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan BNN; 9. Surat Perintah No : Sprin/1027/V/2014/BNN tanggal 29 Mei 2013 tentang Tim Pokja Penguatan Pengawasan di lingkungan BNN; 10. Surat Perintah No : Sprin/1028/V/2014/BNN tanggal 29 Mei 2013 tentang Tim Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di lingkungan BNN; 11. Surat Perintah No : Sprin/1029/V/2014/BNN tanggal 29 Mei 2013 tentang Tim Pokja Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Reformasi Birokrasi di lingkungan BNN.</p>
	b	Tim Reformasi Birokrasi telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerja Tim Reformasi Birokrasi	<p>a. Seluruh tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja</p> <p>b. Sebagian besar tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja</p> <p>c. Sebagian kecil tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja</p> <p>d. Seluruh tugas belum dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja</p>	B	0.67		Laporan Reformasi Birokrasi.

	c	Tim Reformasi Birokrasi telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti	a. Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti d. Seluruh rencana kerja belum dimonitoring dan di evaluasi	C	0.33		Laporan Reformasi Birokrasi.
2. Road Map Reformasi Birokrasi					0.87	86.8%	
	a	Road Map telah disusun dan diformalkan	Road Map telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal	Ya	1		Road Map dan Dokumen Usulan BNN.
	b	Road Map telah mencakup 8 area perubahan	a. 4 area atau lebih b. 1-3 area c. tidak ada	A	1		Road Map dan Dokumen Usulan BNN.
	c	Road Map telah mencakup "quick win"	a. Quick win ada sesuai dengan ekspektasi dan dapat diselesaikan dalam waktu cepat b. Quick win ada tapi tidak sesuai dengan ekspektasi atau tidak dapat diselesaikan dalam waktu cepat c. Belum ada quick win	A	1		Road Map dan Dokumen Usulan BNN.
	d	Penyusunan Road Map telah melibatkan seluruh unit organisasi	a. Seluruh unit organisasi telah dilibatkan dalam penyusunan Road Map b. Sebagian besar unit organisasi telah dilibatkan dalam penyusunan Road Map c. Sebagian kecil unit organisasi telah dilibatkan dalam penyusunan Road Map d. Belum ada organisasi yang dilibatkan dalam penyusunan Road Map	B	0.67		Road Map dan Dokumen Usulan BNN.
	e	Telah terdapat sosialisasi/internalisasi Road Map kepada anggota organisasi	a. Seluruh anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map b. Sebagian besar anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map c. Sebagian kecil anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map d. Seluruh anggota organisasi belum mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map	B	0.67		Road Map dan Dokumen Usulan BNN.
3. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi					1	50%	
	a	PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik	a. Seluruh PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik b. Sebagian besar PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik c. Sebagian kecil PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik d. Seluruh PMPRB belum direncanakan dan diorganisasikan dengan baik	B	0.67		Daftar Hadir Rapat PMPRB.
	b	Aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit kerja	a. Seluruh aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi b. Sebagian besar aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi c. Sebagian kecil aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi d. Seluruh aktivitas PMPRB belum dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi	B	0.67		Daftar Hadir Rapat PMPRB.
	c	Telah dilakukan pelatihan yang cukup bagi Tim Asesor PMPRB	a. Seluruh Tim Asesor PMPRB telah mendapatkan pelatihan b. Sebagian besar Tim Asesor PMPRB telah mendapatkan pelatihan c. Sebagian kecil Tim Asesor PMPRB telah mendapatkan pelatihan d. Seluruh Tim Asesor PMPRB belum mendapatkan pelatihan	C	0.33		Daftar Hadir Rapat PMPRB.
	d	Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor sesuai dengan ketentuan yang berlaku	a. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB dan yang bersangkutan terlibat sepenuhnya sejak tahap awal hingga akhir proses PMPRB. b. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB, tetapi partisipasinya tidak meliputi seluruh proses PMPRB. c. Terdapat penetapan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB, tetapi fungsi asesor dari unit tersebut dilakukan oleh pegawai lain d. Partisipasi pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB belum ada.	C	0.33		1.Skep Kepala BNN No : Kep/226/VIII/2013/BNN tanggal 23 Agustus 2013 tentang Pembentukan Tim Asesor PMPRB di lingkungan BNN; 2.Surat Perintah Kepala BNN No : Sprin/1856/VIII/2013/BNN tanggal 30 Agustus 2013 tentang Tim Asesor PMPRB di lingkungan BNN.
	e	Apakah koordinator asesor PMPRB melakukan revidi terhadap kertas kerja asesor sebelum menyusun kertas kerja instansi?	a. Koordinator asesor telah melakukan revidi terhadap seluruh kertas kerja sebelum menyusun kertas kerja instansi b. Koordinator asesor telah melakukan revidi terhadap sebagian kertas kerja sebelum menyusun kertas kerja instansi c. Koordinator asesor belum melakukan revidi kertas kerja sebelum menyusun kertas kerja instansi	B	0.5		Laporan PMPRB.

	f	Apakah para asesor mencapai konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB instansi?	a. Mayoritas koordinator assessor mencapai konsensus dan seluruh kriteria dibahas b. Tidak seluruh koordinator assessor mencapai konsensus dan/atau tidak seluruh kriteria dibahas; c. Belum ada konsensus yang dicapai oleh para koordinator assessor	B	0.5		Laporan PMPRB.
	g	Rencana aksi tindak lanjut (RATL) telah dikomunikasikan dan dilaksanakan	a. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) yang telah dikomunikasikan dan dilaksanakan b. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) namun belum dikomunikasikan dan dilaksanakan c. Belum terdapat Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL)	B	0.5		Laporan PMPRB.
4. Perubahan pola pikir dan budaya kinerja					0.7	69.67%	
	a	Terdapat keterlibatan pimpinan tertinggi secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi	a. seluruh jajaran pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi b. sebagian besar pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi c. sebagian kecil pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi d. Seluruh jajaran pimpinan tertinggi belum terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi	B	0.67		Peraturan Kepala BNN No 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Nilai-Nilai Organisasi Dalam Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan BNN.
	b	Terdapat media komunikasi secara reguler untuk menyosialisasikan tentang reformasi birokrasi yang sedang dan akan dilakukan	a. Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai dan pemangku kepentingan terkait serta dilaksanakan secara berkala b. Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai dan pemangku kepentingan terkait c. Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai d. Ada media komunikasi namun cakupannya terbatas pada pegawai tingkatan tertentu e. Belum ada media komunikasi untuk mensosialisasikan pelaksanaan reformasi birokrasi	B	0.75		Rolling text, standing banner.
	c	Terdapat upaya untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan melalui pembentukan agent of change ataupun role model	a. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of Change secara formal dan sesuai ukuran organisasi, dan sudah mengikuti pelatihan sebagai role model dalam perubahan b. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of Change secara formal dan sesuai ukuran organisasi c. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of Change namun secara formal belum dilakukan d. Belum ada upaya untuk membentuk Agent of Change	B	0.67		Terdapat Sprin untuk personil yang ditunjuk menjadi agent of change.
Rencana Aksi			Telah dibentuk agen of change.				
II.PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN					2.71	54.25%	
1. Harmonisasi					1.25	50%	
	a	Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron	a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron b. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap sebagian peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron c. Belum dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron	B	0.5		Indeks Peraturan Perundang-Undangan.
	b	Telah dilakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron	a. Revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron telah selesai dilakukan, atau tidak ditemukan adanya peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis b. Upaya revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron telah dilakukan, namun belum selesai c. Belum dilakukan upaya revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron	B	0.5		Indeks Peraturan Perundang-Undangan.
2. Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan					1.46	58.5%	
	a	Adanya Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan yang mensyaratkan adanya Rapat Koordinasi, Naskah Akademis/kajian/policy paper, dan Paraf Koordinasi	a. Seluruh persyaratan lengkap dan diimplementasikan b. Ada persyaratan tersebut namun baru sebagian diimplementasikan c. Ada persyaratan tersebut namun belum diimplementasikan d. Belum ada persyaratan tersebut	B	0.67		Naskah Akademik Konsep Peraturan Kepala BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN, BNNP, dan BNN Kabupaten/ Kota.

	b	Telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan	a. Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan secara berkala b. Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan secara tidak berkala c. Belum pernah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan	B	0.5		Naskah Akademik Konsep Peraturan Kepala BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN, BNNP, dan BNN Kabupaten/ Kota.
Rencana Aksi			Rencana aksi akan dilakukan analisis peraturan perundangan lebih lanjut.				
III.PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI					5.67	94.44%	
1. Evaluasi					3	88.89%	
	a	Telah dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi	a. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi kepada seluruh unit organisasi b. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi kepada sebagian unit organisasi c. Belum dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi kepada unit organisasi	A	1		Terdapat beberapa Peraturan Kepala BNN yang dirubah/ direvisi, yaitu : 1.Peraturan Kepala BNN No 5 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Rehabilitasi BNN. 2.Peraturan Kepala BNN No 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Rehabilitasi BNN. 3.Peraturan Kepala BNN No 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Laboratorium Narkoba BNN. 4.Peraturan Kepala BNN No 2 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan BNN. 5.Peraturan Kepala BNN No 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Rehabilitasi BNN. 6.Peraturan Kepala BNN No 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
	b	Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi	a. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada seluruh unit organisasi b. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada sebagian unit organisasi c. Belum dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada unit organisasi	B	0.5		Berita Acara Validasi BNN.
	c	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi	a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi kepada seluruh unit kerja b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi kepada sebagian unit kerja c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi kepada unit kerja	A	1		Beberapa Peraturan Kepala BNN yang telah dirubah/ direvisi : 1.Peraturan Kepala BNN No 5 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Rehabilitasi BNN. 2.Peraturan Kepala BNN No 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Rehabilitasi BNN. 3.Peraturan Kepala BNN No 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Laboratorium Narkoba BNN. 4.Peraturan Kepala BNN No 2 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan BNN. 5.Peraturan Kepala BNN No 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Rehabilitasi BNN. 6.Peraturan Kepala BNN No 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.

	d	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok	a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok kepada seluruh unit kerja b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok kepada sebagian unit kerja c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok kepada unit kerja	A	1		Peraturan Kepala BNN yang telah dirubah/ direvisi : 1.Peraturan Kepala BNN No 5 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Rehabilitasi BNN. 2.Peraturan Kepala BNN No 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Rehabilitasi BNN. 3.Peraturan Kepala BNN No 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Laboratorium Narkoba BNN. 4.Peraturan Kepala BNN No 2 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan BNN. 5.Peraturan Kepala BNN No 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Rehabilitasi BNN. 6.Peraturan Kepala BNN No 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
	e	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan	a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan kepada seluruh unit kerja b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan kepada sebagian unit kerja c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan kepada unit kerja	A	1		Terdapat Peraturan Kepala BNN tentang Whistle Blower System.
	f	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan	a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan kepada seluruh unit kerja b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan kepada sebagian unit kerja c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan kepada unit kerja	A	1		Berita Acara Validasi BNN.
	g	Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat	a. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat kepada seluruh unit kerja b. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat kepada sebagian unit kerja c. Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat kepada unit kerja	B	0.5		Berita Acara Validasi BNN dan Daftar Susunan Pegawai BNN.
	h	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain	Ya, apabila telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain	Ya	1		Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala BNN RI Nomor : 01/PB/MA/III/2014, 03 TAHUN 2014, 11 TAHUN 2014, 03 TAHUN 2014, PER-005/A/JA/03/2014, 1 TAHUN 2014, PERBER/01/III/2014/BNN tanggal 11 Maret 2014 tentang Penanganan PEcandu Narkotika dan Korban Penyalah-gunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.
	i	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis	Ya, apabila telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis	Ya	1		Peraturan Kepala BNN No 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
	2. Penataan				3	100%	

	a	Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi	a. Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi b. Sebagian besar hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi c. Sebagian kecil hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi d. Seluruh hasil evaluasi belum ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi	A	1		Revisi atau perubahan organisasi dengan : 1.Peraturan Kepala BNN No 5 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Rehabilitasi BNN. 2.Peraturan Kepala BNN No 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Rehabilitasi BNN. 3.Peraturan Kepala BNN No 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Laboratorium Narkoba BNN. 4.Peraturan Kepala BNN No 2 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan BNN. 5.Peraturan Kepala BNN No 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Rehabilitasi BNN. 6.Peraturan Kepala BNN No 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
Rencana Aksi			Rencana aksi evaluasi organisasi dan penataan birokrasi di lingkungan BNN dengan melibatkan konsultan independen.				
IV.PENATAAN TATALAKSANA					3.72	74.38%	
1. Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama					1.13	75.25%	
	a	Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi	a. Seluruh unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi b. Sebagian besar unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi c. Sebagian kecil unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi d. Seluruh unit organisasi belum memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi	A	1		Standar Operasional Prosedur (SOP) di setiap Satuan Kerja BNN.
	b	Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP)	a. Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP b. Sebagian besar peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP c. Sebagian kecil peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP d. Seluruh peta proses bisnis belum dijabarkan dalam SOP	B	0.67		Standar Operasional Prosedur (SOP) di setiap Satuan Kerja BNN.
	c	Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan	a. Seluruh unit organisasi telah menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP) b. Sebagian besar unit organisasi telah menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP) c. Sebagian kecil unit organisasi telah menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP) d. Seluruh unit organisasi belum menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP)	B	0.67		Standar Operasional Prosedur (SOP) di setiap Satuan Kerja BNN.
	d	Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi	a. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti b. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala namun belum seluruh hasilnya ditindaklanjuti c. Terdapat evaluasi namun belum menganalisis efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP d. Belum ada evaluasi terhadap efisiensi dan efektifitas peta proses bisnis dan prosedur operasional	B	0.67		Standar Operasional Prosedur (SOP) di setiap Satuan Kerja BNN.
2. E-Government					1.51	75.25%	
	a	Sudah memiliki rencana pengembangan e-government di lingkungan instansi	Ya, apabila sudah memiliki rencana pengembangan e-government di lingkungan instansi	Ya	1		Renja Puslitdatin.
	b	Sudah dilakukan pengembangan e-government di lingkungan internal dalam rangka mendukung proses birokrasi (misal: intranet, sistem perencanaan dan penganggaran, sistem data base SDM, dll)	a. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi b. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government namun belum terintegrasi c. Sudah dilakukan pengembangan e-government namun belum dilakukan implementasi d. Belum ada pengembangan dan implementasi e-government	B	0.67		Laporan Pemakaian Internet.

	c	Sudah dilakukan pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (misal: website untuk penyediaan informasi kepada masyarakat, sistem pengaduan)	a. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi b. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government namun belum terintegrasi c. Sudah dilakukan pengembangan e-government namun belum dilakukan implementasi d. Belum ada pengembangan dan implemetasi e-government	B	0.67		Laporan Website.
	d	Sudah dilakukan pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional (masyarakat dapat mengajukan perijinan melalui website, melakukan pembayaran, dll)	a. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi b. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government namun belum terintegrasi c. Sudah dilakukan pengembangan e-government namun belum dilakukan implementasi d. Belum ada pengembangan dan implemetasi e-government	B	0.67		Laporan / Pengaduan masyarakat, konsep Peraturan Kepala BNN tentang Unit Lelang Pengadaan.
3. Keterbukaan Informasi Publik					1.09	72.33%	
	a	Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik (identifikasi informasi yang dapat diketahui oleh publik dan mekanisme penyampaian)	Ya, apabila telah ada kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik	Ya	1		Peraturan Kepala BNN dan Keputusan Kepala BNN mengenai Pelayanan Informasi Publik BNN, yaitu: 1.Peraturan Kepala BNN No 11 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik di lingkungan BNN. 2.Keputusan Kepala BNN No KEP/347/VII/2012/BNN tanggal 20 Juli 2012 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi BNN. 3.Keputusan Kepala BNN No KEP/221/III/2014/BNN tanggal 27 Maret 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu BNN.
	b	Menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik	a. Seluruh informasi publik telah dapat diakses b. Sebagian besar informasi publik telah dapat diakses c. Sebagian kecil informasi publik telah dapat diakses d. Seluruh informasi publik belum dapat diakses	B	0.67		Website BNN.
	c	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan secara berkala b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan tidak berkala c. Belum ada monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	B	0.5		Laporan pengaduan dari website dan call center.
Rencana Aksi			Rencana Aksi: 1. Penyusunan Road Map 2015 - 2019. 2. Evaluasi dan Sinkronisasi SOP.				
V.PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15)					13.39	89.24%	
1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi					1	100%	
	a	Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan	a. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada seluruh jabatan b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada sebagian besar jabatan c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada sebagian kecil jabatan d. Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilakukan	A	1		Berita Acara Validasi.
	b	Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan	a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada seluruh unit organisasi b. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada sebagian besar unit organisasi c. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada sebagian kecil unit organisasi d. Perhitungan kebutuhan pegawai belum dilakukan	A	1		Daftar Susunan Pegawai BNN.

	c	Rencana redistribusi pegawai telah disusun dan diformalkan	ya, apabila terdapat dokumen rencana redistribusi pegawai	Ya	1		Daftar Susunan Pegawai BNN.
	d	Proyeksi kebutuhan 5 tahun telah disusun dan diformalkan	ya, apabila terdapat dokumen tentang proyeksi kebutuhan 5 tahun	Ya	1		Daftar Susunan Pegawai BNN.
	e	Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan	a. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan pada seluruh unit organisasi b. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan pada sebagian besar unit organisasi c. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan pada sebagian kecil unit organisasi d. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan belum dilakukan	A	1		Daftar Susunan Pegawai BNN.
2. Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN					2	100%	
	a	Pengumuman penerimaan diinformasikan secara luas kepada masyarakat	a. Pengumuman penerimaan disebarluaskan melalui berbagai media (misal: website, jejaring sosial, dsb) b. Pengumuman penerimaan diinformasikan melalui media secara terbatas (misal: papan pengumuman di kantor) c. Pengumuman penerimaan belum disebarluaskan	A	1		Laporan pelaksanaan CPNS
	b	Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan pasti (online)	Ya, apabila pendaftaran dapat dilakukan secara online dan dapat segera diperoleh informasi mengenai kepastian status pendaftaran.	Ya	1		Laporan pelaksanaan CPNS.
	c	Persyaratan jelas, tidak diskriminatif	Ya, apabila terdapat kejelasan persyaratan administrasi dan kompetensi. Persyaratan memberikan kesempatan luas kepada masyarakat.	Ya	1		Laporan pelaksanaan CPNS.
	d	Proses seleksi transparan, objektif, adil, akuntabel dan bebas KKN	Ya, apabila proses seleksi jelas kriteria dan prosesnya, tidak terjadi KKN, dan dapat dipertanggungjawabkan.	Ya	1		Laporan pelaksanaan CPNS.
	e	Pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara terbuka	Ya, apabila Pengumuman hasil seleksi dapat diakses oleh publik dengan mudah	Ya	1		Laporan pelaksanaan CPNS.
3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi					0.67	66.67%	
	a	Telah ada standar kompetensi jabatan	Ya, apabila terdapat kebijakan tentang tentang kompetensi jabatan	Ya	1		Ada.
	b	Telah dilakukan <i>assessment</i> pegawai	a. Telah dilakukan <i>assessment</i> kepada seluruh pegawai b. Telah dilakukan <i>assessment</i> kepada sebagian besar pegawai c. Telah dilakukan <i>assessment</i> kepada sebagian kecil pegawai d. Belum dilakukan <i>assessment</i> pegawai	B	0.67		Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Deputi Pencegahan BNN.
	c	Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi	a. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai b. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada sebagian besar pegawai c. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada sebagian kecil pegawai d. Belum dilakukan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai	B	0.67		Rencana kebutuhan pegawai.
	d	Telah disusun rencana pengembangan kompetensi dengan dukungan anggaran yang mencukupi	a. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi seluruh pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupi b. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi sebagian besar pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupi c. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi sebagian kecil pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupi d. Belum ada rencana pengembangan kompetensi pegawai	C	0.33		RKAKL tentang <i>assessment</i> .
	e	Telah dilakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi	a. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada seluruh pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi b. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian besar pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi c. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian kecil pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi d. Belum ada pengembangan pegawai berbasis kompetensi	C	0.33		Rekapitulasi pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.
	f	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala	a. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala b. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara tidak berkala c. Belum ada monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi	A	1		Rekapitulasi pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.
4. Promosi jabatan dilakukan secara terbuka					6	100%	
	a	Kebijakan promosi terbuka telah ditetapkan	ya, apabila terdapat kebijakan tentang promosi terbuka dan telah ditetapkan	Ya	1		Keputusan Kepala BNN tentang Seleksi Terbuka Jabatan Eselon I.

	b	Promosi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi telah dilaksanakan	a. Pengisian jabatan pimpinan tinggi (utama, madya dan pratama) telah dilakukan melalui promosi terbuka secara nasional b. Pengisian jabatan pimpinan tinggi (utama, madya dan pratama) telah dilakukan melalui promosi terbuka secara terbatas c. Promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi terbatas pada posisi jabatan pimpinan tinggi pratama d. Belum ada promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi	A	1		Laporan pelaksanaan Seleksi Terbuka jabatan Deputi Pencegahan BNN.
	c	Promosi terbuka dilakukan secara kompetitif dan obyektif	Ya, apabila pelaksanaan promosi dilakukan dengan cara kompetitif dan penilaian dilakukan secara obyektif	Ya	1		Laporan pelaksanaan Seleksi Terbuka jabatan Deputi Pencegahan BNN.
	d	Promosi terbuka dilakukan oleh panitia seleksi yang independen	Ya, apabila telah ditetapkan susunan panitia seleksi yang berasal dari pihak-pihak independen	Ya	1		Laporan pelaksanaan Seleksi Terbuka jabatan Deputi Pencegahan BNN.
	e	Hasil setiap tahapan seleksi diumumkan secara terbuka	Ya, apabila tahapan diumumkan secara terbuka melalui media IT seperti website panitia seleksi dsb	Ya	1		Laporan pelaksanaan Seleksi Terbuka jabatan Deputi Pencegahan BNN.
5. Penetapan kinerja individu					1.05	52.57%	
	a	Penerapan Penetapan kinerja individu	a. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap seluruh pegawai b. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap sebagian besar pegawai c. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap sebagian kecil pegawai d. Belum ada penerapan penetapan kinerja individu yang telah dilakukan	B	0.67		Terdapat Penetapan Kinerja seluruh Pegawai BNN.
	b	Terdapat penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi	a. Seluruh pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi b. Sebagian besar pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi c. Sebagian kecil pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi d. Belum ada pegawai yang melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi	B	0.67		Sistem Manajemen Kinerja (Polri) dan Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS).
	c	Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya	a. Seluruh pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu di atasnya b. Sebagian besar pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu di atasnya c. Sebagian kecil pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu di atasnya d. Seluruh pegawai belum memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu di atasnya	B	0.67		Sistem Manajemen Kinerja (Polri) dan Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS).
	d	Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik	a. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan b. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan e. Pengukuran kinerja individu belum dilakukan	C	0.5		Sistem Manajemen Kinerja (Polri) dan Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS).
	e	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu.	a. telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara berkala b. telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara tidak berkala c. Belum ada monev pencapaian kinerja individu	B	0.5		Sistem Manajemen Kinerja (Polri) dan Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS).
	f	Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu	a. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu terhadap seluruh pegawai b. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu terhadap sebagian besar pegawai c. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu terhadap sebagian kecil pegawai d. Hasil penilaian kinerja individu belum dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu terhadap seluruh pegawai	B	0.67		Sistem Manajemen Kinerja (Polri) dan Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS).
	g	Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja	a. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada seluruh pegawai b. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada sebagian besar pegawai c. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada sebagian kecil pegawai d. Capaian kinerja individu belum dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada seluruh pegawai	D	0		Dimasukkan ke dalam rencana aksi BNN.

6. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai				0.75	75%	
a	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah ditetapkan	ya, apabila terdapat kebijakan tentang disiplin/kode etik/kode perilaku	Ya	1		Peraturan Kepala BNN No 6 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai BNN.
b	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan	a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan kepada seluruh unit organisasi b. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan kepada sebagian besar unit organisasi c. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan kepada sebagian kecil unit organisasi d. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi belum diimplementasikan kepada seluruh unit organisasi	B	0.67		Laporan pelaksanaan Apel Pagi.
c	Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi	a. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi secara berkala b. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi tidak berkala c. Belum ada monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi	A	1		Laporan pelaksanaan Apel Pagi.
d	Adanya pemberian sanksi dan imbalan (<i>reward</i>)	a. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (<i>reward</i>) kepada seluruh unit organisasi b. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (<i>reward</i>) kepada sebagian besar unit organisasi c. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (<i>reward</i>) kepada sebagian kecil unit organisasi d. Belum ada pemberian sanksi dan imbalan (<i>reward</i>) kepada unit organisasi	C	0.33		Laporan pelaksanaan Apel Pagi.
7. Pelaksanaan evaluasi jabatan				1	100%	
a	Informasi faktor jabatan telah disusun	Ya, apabila terdapat dokumen tentang penyusunan Faktor Jabatan	Ya	1		Berita Acara Validasi.
b	Peta jabatan telah ditetapkan	a. Seluruh unit organisasi telah menetapkan peta jabatan b. Sebagian besar unit organisasi telah menetapkan peta jabatan c. Sebagian kecil unit organisasi telah menetapkan peta jabatan d. Seluruh unit organisasi belum menetapkan peta jabatan	A	1		Berita Acara Validasi.
c	Kelas jabatan telah ditetapkan	a. Seluruh unit organisasi telah menetapkan kelas jabatan b. Sebagian besar unit organisasi telah menetapkan kelas jabatan c. Sebagian kecil unit organisasi telah menetapkan kelas jabatan d. Seluruh unit organisasi belum menetapkan kelas jabatan	A	1		Berita Acara Validasi.
8. Sistem Informasi Kepegawaian				0.92	91.75%	
a	Sistem informasi kepegawaian telah dibangun sesuai kebutuhan	Ya, apabila terdapat sistem informasi yang dibangun sesuai dengan kebutuhan	Ya	1		www.simpegbnn.go.id
b	Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai	Ya, apabila pegawai dapat mengakses sistem informasi kepegawaian	Ya	1		www.simpegbnn.go.id
c	Sistem informasi kepegawaian terus dimutakhirkan	a. Seluruh unit organisasi terus memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian b. Sebagian besar unit organisasi terus memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian c. Sebagian kecil unit organisasi terus memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian d. Seluruh unit organisasi belum memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian	B	0.67		www.simpegbnn.go.id
d	Sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM	Ya, apabila sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM	Ya	1		www.simpegbnn.go.id
Rencana Aksi		Rencana Aksi akan : 1. Membuat pengembangan Simpeg. 2. Pengembangan kompetensi pegawai.				
VI. Penguatan Akuntabilitas				5.46	91.07%	
1. Keterlibatan pimpinan				2	100%	

	a	Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra	a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra b. Sebagian besar pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra c. Sebagian kecil pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra d. Seluruh pimpinan belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra	A	1		Rencana Strategis BNN dan Rencana Kerja BNN.
	b	Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja	a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja b. Sebagian besar pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja c. Sebagian kecil pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja d. Seluruh pimpinan belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja	A	1		Perjanjian Penetapan Kinerja.
	c	Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	a. Seluruh pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala b. Sebagian besar pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala c. Sebagian kecil pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala d. Seluruh pimpinan belum memantau pencapaian kinerja secara berkala	A	1		Lembar Kinerja Pegawai.
2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja					3.46	86.6%	
	a	Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	a. Seluruh unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja b. Sebagian besar unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja c. Sebagian kecil unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja d. Seluruh unit organisasi belum berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	A	1		Rekapitulasi pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.
	b	Apakah pedoman akuntabilitas kinerja telah disusun	Ya, apabila terdapat dokumen pedoman akuntabilitas kinerja	Ya	1		Rencana Strategis dan Rencana Kerja BNN.
	c	Sistem Pengukuran Kinerja telah dirancang berbasis elektronik	a. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sudah terimplementasi dan terintegrasi b. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sudah terimplementasi tapi belum terintegrasi c. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik dalam pengembangan tp belum implementasi d. Belum ada Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik	C	0.33		www.monevgar.bnn.go.id akan terus dikembangkan.
	d	Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh seluruh unit	a. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh seluruh unit organisasi b. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian besar organisasi c. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem pengukuran kinerja belum dapat diakses oleh unit organisasi	A	1		www.monevgar.bnn.go.id
	e	Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala	a. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara bulanan b. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara triwulanan c. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara semesteran d. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara tahunan e. Pemutakhiran data kinerja belum dilakukan	A	1		www.monevgar.bnn.go.id
Rencana Aksi			Rencana Aksi pengembangan sistem monev untuk mengukur capaian kinerja pada aspek manfaat (Outcome).				
VII. Penguatan Pengawasan					5.64	47.02%	
1. Gratifikasi					0.45	30%	
	a	Telah terdapat kebijakan penanganan gratifikasi	Ya, apabila telah ditetapkan kebijakan tentang penanganan gratifikasi	Ya	1		Konsep Peraturan Kepala BNN tentang Penanganan Gratifikasi.
	b	Telah dilakukan public campaign	a. Public campaign telah dilakukan secara berkala b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala c. Belum dilakukan public campaign	B	0.5		
	c	Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan	Ya, apabila UPG melaporkan secara berkala tentang praktik gratifikasi	Tidak	0		Dimasukkan ke dalam rencana aksi BNN.
	d	Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi	Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi	Tidak	0		Dimasukkan ke dalam rencana aksi BNN.

	e	Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti	Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut	Tidak	0		Dimasukkan ke dalam rencana aksi BNN.
2. Penerapan SPIP					1.25	83.5%	
	a	Telah terdapat peraturan Pimpinan organisasi tentang SPIP	Ya, apabila ada peraturan pimpinan organisasi tentang SPIP	Ya	1		Peraturan Kepala BNN No 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Badan Narkotika Nasional.
	b	Telah dibangun lingkungan pengendalian	a. Seluruh organisasi telah membangun lingkungan pengendalian b. Sebagian organisasi telah membangun lingkungan pengendalian c. Seluruh organisasi belum membangun lingkungan pengendalian	A	1		Laporan Pengawasan Apel.
	c	Telah dilakukan penilaian risiko atas organisasi	a. Seluruh organisasi telah melaksanakan penilaian risiko b. Sebagian besar organisasi telah melaksanakan penilaian risiko c. Sebagian kecil organisasi telah melaksanakan penilaian risiko d. Seluruh organisasi belum melaksanakan penilaian risiko	B	0.67		Evaluasi LAKIP, Pelaksanaan Audit dan Reviu Laporan Keuangan.
	d	Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	a. Seluruh organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi b. Sebagian besar organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi c. Sebagian kecil organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi d. Seluruh organisasi belum melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	B	0.67		Laporan Pelaksanaan audit rutin.
	e	SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait	a. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait b. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian besar pihak terkait c. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian kecil pihak terkait d. Belum ada pihak terkait yang mendapatkan informasi dan komunikasi mengenai SPI	B	0.67		Peraturan Kepala BNN No 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Badan Narkotika Nasional.
	f	Telah dilakukan pemantauan pengendalian intern	a. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Belum ada monitoring dan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern	A	1		Laporan pengawasan Inspektorat Utama BNN.
3. Pengaduan Masyarakat					1.74	86.8%	
	a	Telah disusun kebijakan pengaduan masyarakat	Ya, apabila telah ditetapkan kebijakan tentang penanganan pengaduan	Ya	1		SOP.
	b	Penanganan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	a. Seluruh unit organisasi mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat b. Sebagian besar unit organisasi mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat c. Sebagian kecil unit organisasi mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat d. Seluruh unit organisasi belum mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat	B	0.67		Laporan Pengaduan Puslitdatin.
	c	Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	a. Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti b. Sebagian besar Hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti c. Sebagian kecil Hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti d. Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat belum ditindaklanjuti	B	0.67		Laporan Tindak Lanjut Puslitdatin.
	d	Telah dilakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	a. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Penanganan pengaduan masyarakat belum dimonitoring dan dievaluasi	A	1		Notulen rapat (Jumat).
	e	Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Ya, apabila terdapat laporan hasil evaluasi atas tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat	Ya	1		Laporan hasil evaluasi.
4. Whistle-Blowing System					0.7	46.6%	

	a	Telah terdapat Whistle Blowing System	Ya, apabila terdapat kebijakan tentang Whistle Blowing System	Ya	1		Surat Perintah Kepala BNN No Sprin/1119/V/IR/IR.00.00/2014/BNN tentang Penunjukkan Tim Petugas Whistle Blowing System Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BNN.
	b	Whistle Blowing System telah disosialisasikan	a. Whistle blowing system disosialisasikan ke seluruh organisasi b. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian besar organisasi c. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian kecil organisasi d. Whistle blowing system belum disosialisasikan ke seluruh organisasi	C	0.33		Surat Perintah Kepala BNN No Sprin/1119/V/IR/IR.00.00/2014/BNN tentang Penunjukkan Tim Petugas Whistle Blowing System Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BNN.
	c	Whistle Blowing System telah diimplementasikan	Ya, apabila kebijakan whistle blowing system telah diimplementasikan	Ya	1		Surat Perintah Kepala BNN No Sprin/1119/V/IR/IR.00.00/2014/BNN tentang Penunjukkan Tim Petugas Whistle Blowing System Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BNN.
	d	Telah dilakukan evaluasi atas Whistle Blowing System	a. Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Belum ada monitoring dan evaluasi Whistle Blowing System	C	0		Dimasukkan ke dalam rencana aksi BNN.
	e	Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti	a. Seluruh Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti d. Seluruh Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System belum ditindaklanjuti	D	0		Dimasukkan ke dalam rencana aksi BNN.
5. Penanganan Benturan Kepentingan					0	0%	
	a	Telah terdapat Penanganan Benturan Kepentingan	Ya, apabila terdapat peraturan/kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan	Tidak	0		Dimasukkan ke dalam rencana aksi BNN.
	b	Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan	a. Penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan ke seluruh unit organisasi b. Penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan ke sebagian besar unit organisasi c. Penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan ke sebagian kecil unit organisasi d. Penanganan Benturan Kepentingan belum disosialisasikan ke seluruh unit organisasi	D	0		Dimasukkan ke dalam rencana aksi BNN.
	c	Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan	Ya, apabila Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan	Tidak	0		Dimasukkan ke dalam rencana aksi BNN.
	d	Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	a. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Penanganan Benturan Kepentingan belum dimonitoring dan evaluasi	C	0		Dimasukkan ke dalam rencana aksi BNN.
	e	Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	a. Seluruh Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti d. Seluruh Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan belum ditindaklanjuti	D	0		Dimasukkan ke dalam rencana aksi BNN.
6. Pembangunan Zona Integritas					0.5	20%	
	a	Telah dilakukan penancangan zona integritas	Ya, apabila terdapat Dokumen Penancangan Zona Integritas ditandatangani sesuai ketentuan	Ya	1		Piagam Zona Integritas dan Bebas Korupsi.
	b	Telah ditetapkan unit yang akan dikembangkan menjadi zona integritas	Ya, apabila ada Surat Keputusan Tentang unit yang ditetapkan	Tidak	0		Dimasukkan ke dalam rencana aksi BNN.
	c	Telah dilakukan pembangunan zona integritas	a. Pembangunan zona integritas dilakukan secara intensif b. Pembangunan zona integritas dilakukan tidak secara intensif c. Belum ada pembangunan zona integritas	C	0		Dimasukkan ke dalam rencana aksi BNN.

	d	Telah dilakukan evaluasi atas zona integritas yang telah ditentukan	a.Zona integritas yang telah ditentukan dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Zona integritas yang telah ditentukan dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Zona integritas yang telah ditentukan belum dimonitoring dan dievaluasi	C	0		Dimasukkan ke dalam rencana aksi BNN.
	e	Telah terdapat unit kerja yang ditetapkan sebagai "menuju WBK/WBBM"	a. Telah terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBBM b. Telah terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBK c. Belum terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBK	C	0		Dimasukkan ke dalam rencana aksi BNN.
7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)					1.01	67%	
	a	Rekomendasi APIP didukung dengan komitmen pimpinan	a. Seluruh rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah ditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir b. Sebagian rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah ditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir c. Sebagian kecil rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah ditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir d. Seluruh rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan belum ditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir	B	0.67		Petunjuk dan Arahan.
	b	APIP didukung dengan SDM yang memadai secara kualitas dan kuantitas.	a. Seluruh fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas b. Sebagian besar fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas c. Sebagian kecil fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas d. Seluruh fungsi pengawasan internal belum tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas	B	0.67		Pelaksanaan pengawasan dapat berjalan secara efektif yang telah direncanakan.
	c	APIP didukung dengan anggaran yang memadai	a. Seluruh kebutuhan didukung oleh anggaran b. Sebagian besar kebutuhan didukung oleh anggaran c. Sebagian kecil kebutuhan didukung oleh anggaran d. Seluruh kebutuhan belum didukung oleh anggaran	B	0.67		Pelaksanaan audit di BNNP dan BNN Kabupaten/ Kota.
	d	APIP berfokus pada client dan audit berbasis risiko	a. Seluruh fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan audit berbasis risiko b. Sebagian besar fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan audit berbasis risiko c. Sebagian kecil fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan audit berbasis risiko d. Seluruh fungsi pengawasan internal belum berfokus pada client dan audit berbasis risiko	B	0.67		Peraturan Kepala BNN No 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Badan Narkotika Nasional.
Rencana Aksi			Rencana Aksi : 1. Akan membuat Perka Whistle Blowing dan Perka Penanganan benturan kepentingan. 2. Akan membuat penetapan unit Zona Integritas.				
VIII. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK					5.07	84.5%	
1. Standar Pelayanan					0.67	66.6%	
	a	Terdapat kebijakan standar pelayanan	Ya, apabila telah terdapat kebijakan standar pelayanan yang mencakup kejelasan biaya, waktu, persyaratan perijinan	Ya	1		Peraturan Kepala BNN tentang Standar Pelayanan.
	b	Standar pelayanan telah dimaklumkan	a. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan b. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada sebagian besar jenis pelayanan c. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada sebagian kecil jenis pelayanan d. Standar pelayanan belum dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan	C	0.33		Standar Pelayanan dalam Balai Lab Narkotika, Balai Besar Rehabilitasi.
	c	Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan	a. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada seluruh jenis pelayanan b. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada sebagian besar jenis pelayanan c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada sebagian kecil jenis pelayanan d. Belum terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan	A	1		Rekapitulasi SOP BNN.
	d	Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan	a. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan secara berkala dan dilakukan dengan melibatkan stakeholders b. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan secara tidak berkala dan/atau tidak dengan melibatkan stakeholders c. Belum dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan	B	0.5		Laporan/ Pengaduan.

	e	Dilakukan revidi dan perbaikan atas SOP	a. Dilakukan revidi dan perbaikan SOP secara berkala b. Dilakukan revidi dan SOP secara tidak berkala c. Belum ada revidi dan perbaikan SOP	B	0.5		Laporan/review atas pelaksanaan SOP di Balai Lab Narkoba dan Balai Besar Rehabilitasi BNN.
2. Budaya Pelayanan Prima					0.67	66.8%	
	a	Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima (contoh: kode etik, estetika, capacity building, pelayanan prima)	a. Seluruh sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima b. Sebagian besar sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima c. Sebagian kecil sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima d. Seluruh sosialisasi/pelatihan belum dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima	B	0.67		Dilaksanakan pendidikan dan pelatihan mindset dan culture set terhadap pegawai BNN.
	b	Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	a. Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb) b. Informasi pelayanan dapat diakses melalui beberapa media (misal: papan pengumuman, selebaran, dsb) c. Informasi pelayanan sulit diakses melalui berbagai media	A	1		Website BNN, televisi (Indonesia Bergegas), call center BNN.
	c	Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	a. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan b. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar ada namun belum diimplementasikan c. Belum terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	C	0		Dimasukkan ke dalam rencana aksi BNN.
	d	Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi	a. Apabila seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu b. Apabila sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara terpadu c. Apabila sebagian kecil pelayanan sudah dilakukan secara terpadu d. Apabila tidak ada pelayanan yang dilakukan secara terpadu	B	0.67		Website Balai Lab Narkoba BNN dan Balai Besar Rehabilitasi BNN, Buku Pedoman Layanan Rehabilitasi.
	e	Terdapat inovasi pelayanan	Ya, apabila terdapat bukti inovasi pelayanan yang diciptakan dan bermanfaat bagi penerima pelayanan	Ya	1		
3. Pengelolaan Pengaduan					1.4	93.4%	
	a	Terdapat media pengaduan pelayanan	Ya, apabila telah ditetapkan media pengaduan pelayanan secara jelas dan terbuka	Ya	1		Website BNN, call center BNN, call center Lido, Kotak Suara, www.labn.go.id
	b	Terdapat SOP pengaduan pelayanan	a. Terdapat SOP pengaduan pelayanan secara komprehensif b. Terdapat SOP pengaduan pelayanan namun belum seluruhnya c. Belum ada SOP pengaduan pelayanan	A	1		Rekapitulasi SOP BNN.
	c	Terdapat unit yang mengelola pengaduan pelayanan	ya, apabila telah ditetapkan unit pengelola pengaduan	Ya	1		Peraturan Kepala BNN dan Keputusan Kepala BNN mengenai Pelayanan Informasi Publik BNN, yaitu: 1.Peraturan Kepala BNN No 11 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik di lingkungan BNN. 2.Keputusan Kepala BNN No KEP/347/VII/2012/BNN tanggal 20 Juli 2012 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi BNN. 3.Keputusan Kepala BNN No KEP/221/III/2014/BNN tanggal 27 Maret 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu BNN.

	d	Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan	a. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan b. Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan c. Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan d. Belum dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan	B	0.67		Laporan Pengaduan.
	e	Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan / masukan	a. Evaluasi atas penanganan keluhan / masukan dilakukan secara berkala b. Evaluasi atas penanganan keluhan / masukan dilakukan tidak berkala c. Belum ada evaluasi penanganan keluhan / masukan	A	1		Laporan Pengaduan.
4. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan					1.34	89%	
	a	Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	a. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan secara berkala b. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tidak berkala c. Belum ada survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	A	1		Laporan Survey dari Balai Lab Narkoba dan Balai Besar Rehabilitasi BNN
	b	Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	Ya, apabila tersedia media untuk mengakses data hasil survey dengan mudah	Ya	1		www.labbnn.go.id
	c	Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat	a. Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survey kepuasan masyarakat b. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survey kepuasan masyarakat c. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survey kepuasan masyarakat d. Belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat	B	0.67		Laporan Tindak Lanjut Puslitdatin.
5. Pemanfaatan Teknologi Informasi					1	100%	
	a	Telah memiliki rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan	Ya, apabila ada rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan	Ya	1		Laporan Pengaduan.
	b	Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan	a. Seluruh pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan b. Sebagian besar pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan c. Sebagian kecil pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan d. Seluruh pelayanan belum menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan	A	1		www.labbnn.go.id
	c	Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus	a. Perbaikan dilakukan secara terus-menerus b. Perbaikan dilakukan tidak secara terus menerus c. Belum dilakukan perbaikan	A	1		Laporan Pengaduan.
Rencana Aksi			1. Rencana Aksi akan membuat workshop untuk memaklumkan standar pelayanan kepada seluruh pelanggan. 2. Rencana Aksi akan menindaklanjuti pedoman rehabilitasi dalam bentuk peraturan kepala.				
B. HASIL					23.06	57.66%	
I. KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI					12.36	61.82%	
		1.Nilai Akuntabilitas Kinerja	Diisi dengan nilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (0 - 100)	61.4	8.6		LAKIP
		2.Nilai Kapasitas Organisasi (Survei Internal)	Diisi dengan nilai hasil Survei Internal Kapasitas Organisasi (0 - 5)	3.14	3.768		Hasil Survey Internal.
Rencana Aksi			Rencana Aksi : - Survey internal akan dibuat setiap tahun dan dievaluasi.				
II. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN					2.5	25%	
		1.Nilai Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)	Diisi dengan nilai hasil Survei Eksternal atas Persepsi Korupsi (0 - 4)	0	0		
		2.Opini BPK	Wajar Tanpa Pengecualian WTP-Dengan Paragraph Penjelasan Wajar Dengan Pengecualian Tidak Memberikan Pendapat Tidak Wajar Tidak Memiliki Laporan Keuangan	WTP-Dengan Paragraph Penjelasan	2.5		
Rencana Aksi			Rencana Aksi akan melakukan survey indeks korupsi di lingkungan BNN.				

III. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			8.2	82%	
1. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)	Diisi dengan Nilai Hasil Survei Eksternal Kualitas Pelayanan (0 - 4)	3.28	8.2		Hasil survey Eksternal.
Rencana Aksi		Rencana Aksi akan terus dilakukan dengan penambahan stakeholder.			
INDEKS RB (Total)				67.96	

*) Tahap Penilaian :

1. Masih dalam proses koordinasi penilaian atau perbaikan penilaian di isnpektorat
2. Sudah disampaikan ke Ketua Tim RB Instansi
3. Sudah dikirim ke Kementerian PAN dan RB